

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Twitter

Pada era perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan banyak perusahaan yang berbasis teknologi mengembangkan aplikasi-aplikasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi. Khususnya sejak kemunculan web 2.0 yang memungkinkan pengguna internet untuk berinteraksi dua arah. Kemunculan media jejaring sosial telah membantu manusia saling terhubung satu dengan yang lain, salah satunya adalah *Twitter*. *Twitter* merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblogging dengan fasilitas mengirim teks info pada akun pengguna dengan panjang maksimum 140 karakter melalui SMS, pesan instan atau surat elektronik (Kusuma, 2009: 4). Media jejaring sosial ini dikembangkan oleh Obvious Corp yang bertempat San Fransisco, Amerika Serikat. *Twitter* dibuat pada bulan Maret 2006 dan diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Bizz Stone, dan Evan Williams.

Sejak diluncurkan tahun 2006, *Twitter* mengalami perkembangan pesat. Layanan servis ini secara cepat menjadi populer di dunia dengan 500 juta pengguna yang teregistrasi pada tahun 2012 dan mengumpulkan lebih kurang 58 juta *tweet* per hari (www.statisticbrain.com). Sebuah lembaga riset web bernama Alexa tahun 2012 menempatkan *Twitter* pada

urutan ke-13 website yang paling banyak diakses di seluruh dunia dan Jakarta tercatat sebagai peringkat pertama kota dengan jumlah *tweet* terbanyak di dunia.

Twitter memiliki fasilitas pencari (*search*) untuk mengetahui topik yang sedang ramai dibicarakan pengguna *Twitter*. Ketika menuliskan nama Jokowi maka akan muncul berbagai kaitan dengan tokoh tersebut, baik yang menggunakan tanda pagar (#JokowiBasuki) maupun yang tidak (jokowi). Username atau alamat akun ditandai dengan simbol “@” sehingga nama yang muncul adalah @jokowi_do2. Fasilitas pencari tidak hanya digunakan untuk mencari akun lain tapi bisa juga untuk mencari topik yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Dalam *Twitter* tanda pagar/tagar (#) digunakan untuk menjadi kata kunci dalam *tweet* yang dituliskan. Setiap orang yang tertarik dengan tanda pagar tersebut dapat bergabung dengan menuliskan *tweet* yang berhubungan dengan topik di tanda pagar tersebut. Semakin sering tanda pagar tersebut digunakan maka semakin besar peluang topik tersebut menjadi *trending topics* atau topik yang paling dibahas waktu itu.

Pertemanan dalam *Twitter* memiliki istilah yang berbeda yaitu pengikut (*followers*) dan mengikuti (*following*). Istilah ini membedakan *Twitter* dengan media lainnya khususnya pada kemudahan untuk berinteraksi tanpa harus menunggu persetujuan satu dengan yang lainnya. Jika pengguna masuk ke dalam akun lain dan ingin mengetahui aktifitas dari akun tersebut maka disebut sebagai mengikuti (*following*). Sedangkan

jika akun pengguna diikuti oleh akun lain maka akun tersebut disebut pengikut (*follower*).

Fasilitas pada *Twitter* untuk menjawab atau mengomentari pesan adalah *reply* atau *reply all*. *Reply* digunakan untuk memberi komentar pada satu akun dan *reply all* digunakan untuk mengomentari lebih dari satu akun. Simbol untuk *reply* maupun *reply all* ini adalah (RT). Pengguna *Twitter* dapat secara langsung mengirimkan *tweet* ke pengguna lainnya atau merujuk pada *tweet* akun lain dalam percakapan dengan menggunakan simbol “@”. Simbol “@” digunakan sebagai penanda alamat yang dituju, dengan adanya simbol ini menunjukkan bahwa pesan/*tweet* tersebut ditujukan pada pemilik akun tertentu.

B. Awal Mula Tagar #2019GantiPresiden

Gerakan tagar politik #2019GantiPresiden yang pada awalnya diinisiasi dan menjadi *political branding* salah satu calon presiden dari PKS, yaitu Mardani Ali Sera, ini berubah menjadi semacam *social movement* yang didukung oleh beragam kalangan dengan tujuan yang sama, ganti presiden tahun depan.

Meski tampak bahwa gerakan tagar politik [#2019GantiPresiden](#) sudah sedemikian terorganisasi, namun masih terdapat kelemahan yang sangat fatal dan pengaruhnya begitu signifikan bagi keberhasilan gerakan, yaitu kecenderungan bahwa gerakan ini terlalu eksklusif dengan branding yang kurang simpatik bagi mereka yang berada di luar istilah “umat”. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa tagar

#2019GantiPresiden mayoritas digawangi oleh kelas menengah Muslim dan didukung oleh *grassroot* yang juga Muslim. Mereka berhimpun dengan tujuan yang sama, yaitu menginginkan peralihan tampuk kekuasaan kepada kelompok yang dianggap lebih mewakili umat, terlepas apakah peralihan itu menuju kepada arah yang lebih baik atau sebaliknya.

Branding kampanye yang dibuat oleh pendukung gerakan ini pun, selalu membawa istilah-istilah yang merujuk pada Islam, seperti perjuangan umat, kembalikan kejayaan umat, menuju kebangkitan Islam, bahkan hingga menganalogikan Pemilu sebagai ajang peperangan melawan kedzaliman. Ketika terminologi-terminologi tersebut dipakai sebagai branding kampanye tagar #2019GantiPresiden, terlihat jelas bahwa gerakan ini ingin mengkapitalisasi suara umat Islam yang mayoritas di negeri ini demi memuluskan tujuan politik kekuasaannya.

Dalam konteks politik elektoral, apabila suara mayoritas didapat, maka kemenangan akan diraih. Umat Islam beserta segala hal yang meliputinya adalah lahan yang sangat seksi untuk “dimaksimalkan”, jika tidak ingin disebut dieksploitasi. Hal itulah yang dilihat sebagai peluang besar oleh pengelola isu dan propaganda tagar #2019GantiPresiden ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud MD mengatakan, tidak setuju jika ada yang berpendapat gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan bentuk tindakan yang melanggar hukum. Mahfud yang mengaku bukan menjadi bagian dari gerakan tagar 2019 ganti presiden, namun ia mempertanyakan, kenapa gerakan tersebut

dibilang melanggar hukum. "2019 ganti presiden itu melanggar hukum enggak? Enggak. Kenapa dibilang enggak melanggar? Enggak apa-apa. Saya bukan pengikut, tetapi saya enggak setuju kalau itu dikatakan melanggar hukum," kata Mahfud dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju dengan tema 'Membangun Demokrasi Beradab' di Jalan Brawijaya VIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 6 September 2018. Sumber: <https://www.viva.co.id/berita/politik/1072363-mahfud-gerakan-2019-ganti-presiden-tidak-langgar-hukum>

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini juga mempertanyakan, terkait adanya sejumlah orang yang nekat menyebut gerakan tagar tersebut merupakan tindakan makar. "Coba, ada yang dengan nekat mengatakan itu makar. Di mana makarnya," ujar Mahfud. Mahfud menerangkan bahwa istilah makar dalam hukum merupakan tindakan kudeta yang dilakukan oleh militer atau oleh kekuatan sipil. "Di dalam pasal 104 sampai 129 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka, satu, merampas kemerdekaan Presiden sampai dia enggak bisa kerja, dikurung, ditahan, itu makar namanya. Kedua, berkomplot merampas kemerdekaan Presiden dan wapres. Ketiga, mengganti ideologi Pancasila. itu menurut KUHP.

Mahfud mengatakan bahwa tagar #2019GantiPresiden tak terdapat unsur tindakan makar sebagaimana diatur di dalam KUHP tersebut. "Lalu, 2019 ganti presiden, mana makarnya, enggak ada makar. Dia tidak menyandera Presiden, dia juga tidak mengatakan mau mengganti

Pancasila. Tapi kan, dia mau ikut pemilu, di mana makarnya," katanya. Mahfud mengatakan, dalam kehidupan bernegara, maka hukum dijadikan sebagai harmoni membangun harmoni. "Saya bukan pengikutnya, tetapi kita harus berhukum dengan benar kalau mau berkeadaban, *restorative justice* juga. Perbedaan jangan dibenturkan melawan hukum, enggak boleh. Kita itu menjadikan hukum sebagai harmoni membangun harmoni," tuturnya. Sumber: <https://www.viva.co.id/berita/politik/1072363-mahfud-gerakan-2019-ganti-presiden-tidak-langgar-hukum>